



PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI NAGARI TANJUNG BONAI AUR KECAMATAN SUMPUR KUDUS KABUPATEN SIJUNJUNG

F Yasmearidi¹, Rini Parmila Yanti², Salma Rani Fitri³

^{1,2}Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

³Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, STIA LPPN Padang

E-mail: fyasmearidi@stia-lppn.ac.id¹, riniiparmilay@stia-lppn.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out how development is carried out in Nagari Tanjung Bonai Aur and to find out the application of good governance in implementing development in Nagari Tanjung Bonai Aur. Based on the results of the study it can be concluded that, 1) Good governance in Nagari tanjung bonai aur still faces several irregularities such as accountability in the form of budget realization reports not being provided to the community, community participation that is less active in development both in musrembang activities and in mutual cooperation. 2) In the implementation of development in the Nagari Tanjung Bonai Aur it can be achieved well, although there are still obstacles such as budget constraints and difficulties in land acquisition. 3). It can be said that the implementation of good governance in Nagari Tanjung Bonai Aur has been carried out well even though it has not been maximized, because in the implementation of development in Nagari Tanjung Bonai Aur the guardian of the Nagari directly involved in surveying the development needed by the people in Nagari Tanjung Bonai Aur, the survey was carried out throughout jorong in nagari tanjung bonai aur, in the implementation of development it has involved all existing elements, in the development carried out it is really what is needed by the community which has been stated in the RKP and is guided by the references to the laws that regulate it.

Keywords: Good Governance, Nagari Development

I. PENDAHULUAN

Terlaksananya good governance yaitu mewujudkan semua aspirasi yang berasal dari masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam hal itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan supaya bisa berdayaguna, berhasilguna. Bersih dan bertanggung jawab dan bebas dari KKN (Korupsi, kolusi, Nepotisme)

Nagari Tanjung Bonai Aur berada di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Tanjung Bonai Aur 40,96 KM. Pemerintah Nagari Terdiri dari Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kaur Bidang Perencanaan dan Pembangunan, Kaur Keuangan, dan Kaur Kesejahteraan Rakyat dan sekarang hadirnya Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) sebagai lembaga legislatif representatif di tingkat Nagari. Nagari Tanjung Bonai Aur termasuk nagari swakarya, tingkat pendidikan yang sedang serta usia produktif yang banyak namun tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas membuat Nagari Tanjung Bonai Aur dalam jajaran Nagari berkembang.

Di Kecamatan Sumpur Kudus khususnya Nagari Tanjung Bonai Aur sudah banyak melakukan pembangunan fisik nagari dan infrastruktur nagari, seperti pembuatan jalan, saluran irigasi dan objek wisata. Setelah melakukan observasi langsung di Nagari Tanjung Bonai Aur, mendapati Nagari ini ada beberapa pembangunan yang terbengkalai / tahap dua dan tidak terlaksana. Setelah melakukan wawancara dengan satu staf wali nagari Tanjung Bonai Aur beliau menjelaskan bahwa kini pembangunan di Nagari Tanjung Bonai Aur banyak seperti jalan produksi Tani, jalan lingkar Nagari, Saluran Irigasi dan objek wisata Nagari Cimboba dan pembangunan fisik 2020 -2022 yang belum terlaksana adalah pembukaan usaha tani, pamparit / embung. Semua itu belum terlaksanakan karena ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan fisik Nagari Tanjung Bonai Aur dikarenakan adanya aturan dari pemerintah, besaran pagu desa masih di atur, pendapatan Nagari masih kecil dan juga selama tahun 2020 – 2022 fokus terbesar penggunaan dana Desa adalah untuk menanggulangi Covid 19 yang berdampak kepada berbagai sandi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya.

Di nagari tanjung bonai aur partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan sangat minim atau masih kurang, dibandingkan dengan tahun sebelumnya partisipasi masyarakat di nagari tanjung bonai aur sangat minim kali dalam partisipasi gotong royong, sekarang masyarakat dimanjakan oleh program-program pemerintah seluruh kegiatan itu sudah di danai, tapi sesuai dengan prinsipnya seluruh kegiatan yang dilasankan yang dituntut adalah swakelola. Dengan pola pikir masyarakat yang berbeda-beda masyarakat masih banyak yang belum mengerti dengan kegiatan swakelola. Selain itu dalam memperoleh informasi tentang pembangunan masyarakat juga masih sulit untuk memperolehnya, karena beberapa informasinya di sebarakan melalui WA, Facebook, dan media social lainnya, di lingkungan masyarakat di nagari tanjung bonai aur tidak semua masyarakat mempunyai smartphone sehingga masyarakat kurang memperoleh tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di nagari.

Dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari agar pembangunan tersebut sukses harusnya ada partisipasi masyarakat di dalamnya, dengan adanya pembangunan di Nagari dapat menguntungkan masyarakat karena adanya lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Pada kenyataannya masih kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif terhadap pelaksanaan pembangunan di Nagari Tanjung Bonai Aur ini sehingga menyebabkan tidak adanya bentuk laporan pertanggung jawaban dari pihak aparat Nagari kepada masyarakat setempat karena lemahnya control dari masyarakat sendiri. Selain partisipasi faktor keuangan daerah juga mempengaruhi penerapan good governance karena merupakan salah

satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Masyarakat yang harusnya ikut serta dan bertindak sebagai penentu arah pembangunan Nagari lewat aspirasinya tetapi cenderung hanya menjadi penonton dalam pembangunan di Nagari. Masalah ini perlu mendapatkan perhatian khusus, karena kurangnya pemahaman serta kepedulian masyarakat terhadap pembangunan nagari yang merupakan satu indikasi gagal nya pmbangunan. Good governance dalam pembangunan bisa dikatakan berhasil jika pemerintah mampu mnumbuhkan persepsi positif dari masyarakat lewat kebijakan yang di terapkan dan realisasi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari latar belakang masalah di atas dapat di ambil judul penelitian yakni : “Good Governance Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung”.

II. METODE

A. Metode Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010) penelitian kuantitatif merupakan tipe penelitian untuk menganalisis pengaruh suatu variabel dengan variabel lainnya..

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor wali nagari tanjung bonai aur, kecamatan sumpur kudus kabupaten sijunjung.

Waktu Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan sesuai jadwal yang ditentukan oleh STIA LPPN Padang..

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data secara objektif dan akurat sesuai dengan keperluan penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan dilakukan untuk membaca naskah dalam bentuk buku, majalah atau tulisan-tulisan lainnya yang diterbitkan secara umum yang berkenaan dengan pengaruh semangat kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT. Capella Multidana Cabang Padang.

2.Study Lapangan (Field Research)

Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara datang ke instansi untuk mendapatkan data primer lewat penyebaran kuesioner penyebaran kuesioner.

3.Kuesioner/Angket

Angket kuesioner merupakan teknik Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono 2010:162). Kuesioner ini penulis sebar kepada responden yang menjadi sample dalam penelitian ini.

4.Observasi

Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2010:166) “mengemukakan observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis”. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Observasi juga merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dimana observasi tidak terbatas pada orang saja tetapi termasuk onjek-objek lainnya..

D. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara deskriptif dan kuantitatif. Untuk analisis kuantitatif dicari menggunakan bantuan program SPSS. Untuk menguji hipotesis dilakukan uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear sederhana, uji korelasi sederhana, uji koefisien determinasi, dan uji hipotesis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Nagari Tanjung Bonai Aur

Pada abad ke – 9 Nagari Tanjung Bonai Aur di kenal dengan Nagari Aur.Kedatangan penduduk adalah Nagari Aur berasal dari Lereng Gunung Merapi yaitu Pariangan Padang Panjang.Balai-balai adatnya merupakan balai-balai yang terpakai di Bodi Caniago yaitu berlabuah kudo di tongah-tongah sebagai pamocah ruang.

Bulan Maret 1949 rapat dilanjutkan di Surau Pincuran Rodah dan sebelumnya di Surau Maco masing-masing surau tersebut milik Dt. Monggung dan EngkuOyok.Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan kewedanaan 3 dan Kecamatan 5 buah, Kecamatan Sumpur Kudus dengan Camatnya Rifa’I Kantor di Tanjung Bonai Aur. Waktu itu dihadiri oleh para Menteri dalam rangka PDRI : Mr Syafrudin Prawira Negara (Presiden PDRI), Tengku Muhammad Hasan 31 (Gubernur Sumatera Tengah), Ir. Sitompul Menteri (Pekerjaan Umum), Ir. Indra Jata (Menteri Perhubungan).

Tahun 1952 Kantor Camat Sumpur Kudus dipindahkan ke Kumanis sampai sekarang.Tahun 1965 dilakukan renovasi terhadap Mesjid Pincuran Tujuh dari memakai tonggak kayu menjadi permanen.Tahun 1983 oleh pemerintah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung dengan Bupatinya Kol.Noer Bahri Pamuncak di bangun Tugu Monumen Hari Jadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang bertempat di Koto Gadang Kenagarian Tanjung Bonai Aur yang lokasinya tidak jauh dari Mesjid Pincuran Tujuh. (Sumber: Kantor Wali Nagari Tanjung Bonai Aur, 2021).

1. Posisi Wilayah

Nagari Tanjung Bonai Aur adalah suatu Nagari yang ada di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat yang merupakan Nagari dengan jarak \pm 39 KM dari Kota Kabupaten.

Kecamatan Sumpur Kudus merupakan salah satu dari 8 kecamatan di Kabupaten Sijunjung.Nagari Tanjung Bonai Aur mempunyai luas Wilayah 4,458

Hektar dengan keadaan sebagian besar adalah perbukitan yang digunakan oleh masyarakat untuk Pertanian dan Perkebunan

Visi dan Misi

1) Visi

Terwujudnya nagari tanjung bonai aur yang berkeadilan, sejahtera, agamais dan beradat menuju tanjung bonai aur mandiri, berprestasi yang madani.

2) Misi

1. Meningkatkan kehidupan beragama dan norma adat berlandaskan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional.
3. Meningkatkan daya saing ekonomi nagari melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkelanjutan dan berkeadilan.
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumber daya nagari berbasis pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.
5. Pembangunan berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan tata ruang.
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik ekonomi dan social.

B. *Good governance* di Nagari Tanjung Bonai Aur Kecamatan Sumpur Kudus

Good governance adalah penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta peniptaan legal dan Politian framework bagi tumbuhnya aktif usaha. Pada dasarnya good governance adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama, sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, sector swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Dalam penelitian ini, ada lima indikator good governance Menurut Mardiasmo, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, aturan hukum dan efektif dan efisien, hal ini sesuai dengan temuan penelitian sebagai berikut:

1. Transparansi Dalam pelaksanaan pembangunan

Nagari Tanjung bonai aur telah transparan dalam memberikan informasi kepada masyarakat. seperti hasil wawancara di atas tampak jelas bahwa informasi pembangunan diberikan kepada masyarakat secara terbuka baik mengenai anggaran dana, jenis pembangunan yang dilaksanakan. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dilaksanakan karena untuk mebrantas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dan informasi yang diberikan juga harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas sudah diterapkan di nagari tanjung bonai aur namun belum berjalan dengan baik karena pemerintahan nagari tanjung bonai aur merasa laporan realisasi anggaran dan pertanggung jawaban tidak perlu disampaikan kepada

masyarakat luas tetapi jika masyarakat ingin mengetahuinya masyarakat diberikan akses untuk laporan tersebut.

3. Partisipasi

partisipasi sudah dilaksanakan di nagari tanjung bonai aur , walaupun masih ada penyimpangan- penyimpangan dan belum terlaksana sebaik mungkin. Seperti partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrembang dan gotong royong masih jauh dari harapan yang sesungguhnya , factor yang menyebabkan nya karena masyarakat memiliki pemikiran bahwa semua pelaksanaan pembangunan telah didanai dan masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka dari pada ikut bergotong royong.

4. Aturan Hukum

Dalam pelaksanaan pembangunan memang ada aturan hukum yang mengaturnya , jika terjadi penyelewengan atau kecuigaan dari masyarakat semua juga diproses sesuai aturan yang ada. Dapat dipahami bahwa nagari tanjung bonai aur sudah menjanjikan system pemerintahan sesuai aturan yang berlaku, semua yang terkait dengan pembangunan memiliki dasar hukumnya.

5. Efektivitas dan efisien

Pembangunan yang dilaksanakan di nagari tanjung bonai aur sudah efektif dan efisien karena pembangunan yang dilaksanakan memang pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat hal ini bertujuan agar supaya nagari tanjung bonai aur dapat dibangun dan berkembang seefektif dan efisien mungkin dengan memanfaatkan sumber daya local yang ada.

Dari hasil keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Good governance di nagari tanjung bonai aur masih menghadapi beberapa penyimpangan seperti halnya : Akuntabilitas berupa pertanggung jawaban atas semua kebijakan yang dilakukan seperti laporan realisasi anggaran tidak disampaikan atau diberikan kepada masyarakat, Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrembang dan dalam kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan masih kurang, atau masyarakat tidak aktif dalam berpartisipasi

C. Pelaksanaan Pembangunan di nagari tanjung Bonai Aur

Pelaksanaan pembangunan di nagari tanjung bonai aur sudah dilaksanakan dengan baik, pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan yang dilaksanakan bisa dirasakan dampaknya oleh setiap masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan wali nagari dan perangkat nagari telah melakukan pengawalan secara langsung atau turun langsung kelapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan tersebut, walaupun dalam pelaksanaannya partisipasi masyarakat yang kurang .meskipun di nagari tanjung bonai aur dalam pelaksanaan nya masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran dan sulitnya pembebasan lahan.

D. Good Governance Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Nagari Tanjung Bonai Aur

Good governance adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses penerpan keputusan dan pelaksanaannya yang dapat di pertanggung jawabkan secara bersama, pembangunan nagari merupakan kegiatan utama nagari karna itu dalam pelaksanaan pembangunan nagari membutuhkan partisipasi dari seluruh unsur unsur pemerintah nagari yang ada di nagari.

Penerapan good governance dalam pelaksanaan pembangunan di nagari tanjung bonai aur :

1. Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik di nagari tanjung bonai aur bapak wali nagari terjun langsung untuk mensurvei pembangunan yang di butuhkan oleh masyarakat di nagari tanjung bonai aur, survei tersebut dilakukan keseluruh jorong yang ada di nagari tanjung bonai aur.
2. Pelaksanaan pembangunan yang baik di nagari tanjung bonai aur bapak wali nagari dalam pelaksanaan telah melibatkan seluruh elemen yang ada, dalam pembangunan yang dilaksanakan memang betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah tertuang didalam RKP . Sehingga dalam pengawasan pembangunan tersebut wali nagari mengawasi langsung kelapangan, dalam pengawasan pembangunan tidak hanya wali nagari yang melaksankannya tapi juga ada elemen dari masyarakat untuk memantau pelaksanaan pembangunan seperti BPN yang merupakan perwakilan masyarakat.

Dari hasil wawancara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pemrinttah nagari tanjung bonai aur sudah menerapkan good governance dalam pelaksanaan pembangunan nagari meskipun belum maksimal dalam pelaksanaannya karena adanya pola pikir yang berbdad- beda di lingkungan masyarakat. untuk menghindari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pemerintah nagari selalu terbuka kepada masyaraat tentang kegiatan pembangunan sehingga pemrintah nagari selalu mengikut sertakan masyarkat dalam kegiatan mulai dari rembuk jorong, musrembang, perencanaan, pelaksanaan , pengawasan hingga serah terima.

Pemerintahan nagari tanjung bonai aur telah berusaha untuk menerapkan good governance di nagari tai semua penilain baik atau buruknya dalah ada di tangan masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap pemerintah nagari tanjung boonai aur.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di bab sebelumnya, bisa ditarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Good governance di nagari tanjung bonai aur masih menghadapi beberapa penyimpangan seperti halnya akuntabilitas berupa pertanggungatas semua kebijakan yang dilakukan seperti laporan realisasi anggaran tidak di berikan kepada masyarakat dan juga dalam segi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masih

kurang aktif, mulai dari Musrembang dan dalam kegiatan gotong royong dalam pelaksanaan pembangunan masih kurang.

2. Pelaksanaan pembangunan di Nagari Tanjung Bonnai Aur Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung khusus mengenai pelaksanaan pembangunan sudah terlaksana dengan baik, meskipun masih ada kendala dalam pelaksanaannya seperti sulitnya dalam pembebasan lahan.
3. Penerapan good governance di nagari tanjung bonnai aur sudah bisa dikatakan terlaksana dengan baik meskipun belum maksimal, karena dalam pelaksanaan pembangunan di nagari tanjung bonnai aur bapak wali nagari terjun langsung untuk mensurvei pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di nagari tanjung bonnai aur, survei tersebut dilakukan keseluruhan jorong yang ada di nagari tanjung bonnai aur, dalam pelaksanaan pembangunan yang baik di nagari tanjung bonnai aur bapak wali nagari dalam pelaksanaan telah melibatkan seluruh elemen yang ada, dalam pembangunan yang dilaksanakan memang betul-betul yang dibutuhkan oleh masyarakat yang sudah tertuang didalam RKP dan berpedoman pada acuan undang-undang yang mengaturnya .

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah didapatkan, maka penulis bisa menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintahan Nagari Tanjung Bonnai Aur untuk kedepannya hendaknya bisa memberikan laporan pertanggung jawaban berupa realisasi anggaran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dana desa tersebut, dan pemerintahan nagari untuk kedepannya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari Pemerintahan Nagari Tanjung Bonnai Aur untuk kedepannya hendaknya bisa memberikan laporan pertanggung jawaban berupa realisasi anggaran kepada masyarakat sehingga masyarakat mengetahui penggunaan dana desa tersebut, dan pemerintahan nagari untuk kedepannya bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nagari
2. Pemerintahan nagari tanjung bonnai aur harus lebih lagi memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya masyarakat lebih memahami perannya dalam pelaksanaan pembangunan di nagari.
3. Untuk masyarakat Tanjung Bonnai Aur perlu adanya kesediaan akan partisipasi mereka dalam pembangunan Nagari sangatlah penting. Hal tersebut akan mencegah adanya kewenangan yang salah gunakan oleh pihak tertentu..

REFERENSI

Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan* . Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.

Annisa, R. (2019). *Good Governance dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Klagen Kecamatan Kedeungtuban Kabupaten Blora*. Jurnal Program Studi Ilmu Sosial Universitas Semarang .

- BPKP, L. d. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Modul 1. Akip.
- Cut, N. (2020). *Penerapan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemabangunan di Desa*.
Jurnal Studi Riset dan Inovasi Pendidikan Kandidat , Vol 2. No.1 .
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Gvernance Melalui Pelayanan Publik*. UGM
PRESS.
- Eko, S. (2005). *Mengkaji Ulang Good Governance*. Yogyakarta: IREYOGYA.
- fransisca maria. (2017). *penerpan prinsip gd governance dalam pelaksanaan dan pertanggung
jawaban alokasi dana desa*.
- Kartasasmita. (2001). *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan
Pemertaan*. Jakarta: Pustaka CIDENCINDO.
- Kessa, W. (2005). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta.
- LAN. (2015). *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Perum Percetakan Negara
RI .
- LAN, & BPKP. (2010). *Akunntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Modul 1. Akip.
- LAN, & BPKP. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance. (Modul Sosialisasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP))*. Modul 1 dari 5. Jakarta:
Lembaga Administrasi Negara RI.